

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibuat, maka dapat disimpulkan bahwa, Letusan Gunung Marapi sebenarnya sudah menunjukkan tanda-tanda awal berupa awan gelap dan suara gemuruh. Namun, karena masyarakat telah terbiasa dengan erupsi yang sebelumnya tidak memberikan dampak, tanda-tanda tersebut cenderung diabaikan. Hingga akhirnya, erupsi yang terjadi menimbulkan dampak yang tidak terduga, yakni hujan abu vulkanik pada 3 Desember 2023 dan banjir galodo pada 11 Mei 2024. Peristiwa ini menjadi tantangan besar bagi Wali Nagari Sungai Pua yang harus menghadapi krisis tersebut. Sebagai pemimpin pemerintahan nagari, Wali Nagari memiliki tanggung jawab untuk mengatasi dampak bencana sekaligus mempertahankan citra positif dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dalam manajemen krisis yang dilakukan oleh Wali Nagari Sungai Pua dalam menghadapi dampak letusan Gunung Marapi, terdapat kendala berupa sulitnya koordinasi panggilan darurat bencana dari pemerintah kabupaten. Hal ini disebabkan oleh banyaknya wilayah yang terdampak di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar. Untuk mengatasi hal tersebut, Wali Nagari Sungai Pua mengambil inisiatif dengan berkomunikasi dengan masyarakat Nagari Sungai Pua dan masyarakat perantauan. Melalui kolaborasi ini, bantuan berupa SDM dan dana untuk pengadaan alat berat, kebutuhan pangan, dan dukungan sektor pertanian dapat segera diperoleh, sehingga penanganan bencana dapat berjalan lebih cepat dan efektif.

Selama proses bencana dan pasca bencana, Wali nagari Sungai Pua telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak seperti Dinas Sosial, BPBD Kabupaten, BPBD Provinsi, PMI, TNI, Damkar, KSB dari berbagai nagari. Pada saat bencana pun Wali nagari langsung membentuk Tim Penanggulangan Bencana yang dimana dalam tim ini terdapat para pemuda masyarakat Nagari Sungai Pua, KSB Nagari Sungai Pua, PARIPAGA dan tokoh-tokoh masyarakat.

Dampak yang diakibatkan dari hujan abu vulkanik seperti jalan yang ditutupi abu dan dampak yang diakibatkan dari banjir galodo seperti hancurnya jembatan, hancurnya rumah warga, terhambatnya jalan karna puing-puing rumah dan hancurnya sawah masyarakat telah dibersihkan dan diselesaikan dalam waktu satu minggu. Dalam proses manajemen pasca krisis, Wali nagari telah melakukan beberapa langkah seperti sosialisasi *trauma healing* dan pendataan bantuan kepada masyarakat, himbauan untuk tidak mempercayai berita selain yang diberitahukan resmi oleh pemerintah nagari dan menerima bantuan dari BPBD berupa EWS.

5.2 Saran

1. Wali Nagari Sungai Pua bersama Wali Jorong di masing-masing wilayah perlu meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Koordinasi yang lebih baik harus dilakukan. Dengan demikian, informasi yang cepat, akurat, dan valid dapat disampaikan secara efektif kepada seluruh masyarakat Nagari Sungai Pua, sehingga mereka dapat lebih waspada dan siap menghadapi potensi bencana.

2. Proses komunikasi dalam manajemen krisis perlu ditingkatkan untuk memastikan penyaluran bantuan lebih merata. Saat ini, masih terdapat masyarakat terdampak yang belum menerima bantuan, yang menunjukkan adanya kendala dalam proses pendataan. Oleh karena itu, penting untuk menyosialisasikan langkah-langkah pendataan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat agar tidak ada masyarakat yang merasa tidak dibantu oleh pemerintah nagari.
3. Untuk memperbaiki komunikasi krisis di masa depan, pemerintah nagari sebaiknya memaksimalkan penggunaan teknologi seperti *Early Warning System* (EWS) agar penyampaian informasi kepada masyarakat Nagari Sungai Pua menjadi lebih cepat, akurat dan valid sehingga dapat mempercepat proses evakuasi masyarakat.
4. Pemerintah nagari sebaiknya memperluas cakupan *trauma healing* bagi masyarakat. Hal ini penting karena bukan hanya anak-anak yang membutuhkan *trauma healing*, tetapi orang dewasa juga membutuhkannya. Dengan langkah ini, diharapkan dapat mengurangi rasa cemas yang berlebihan di kalangan masyarakat Nagari Sungai Pua.